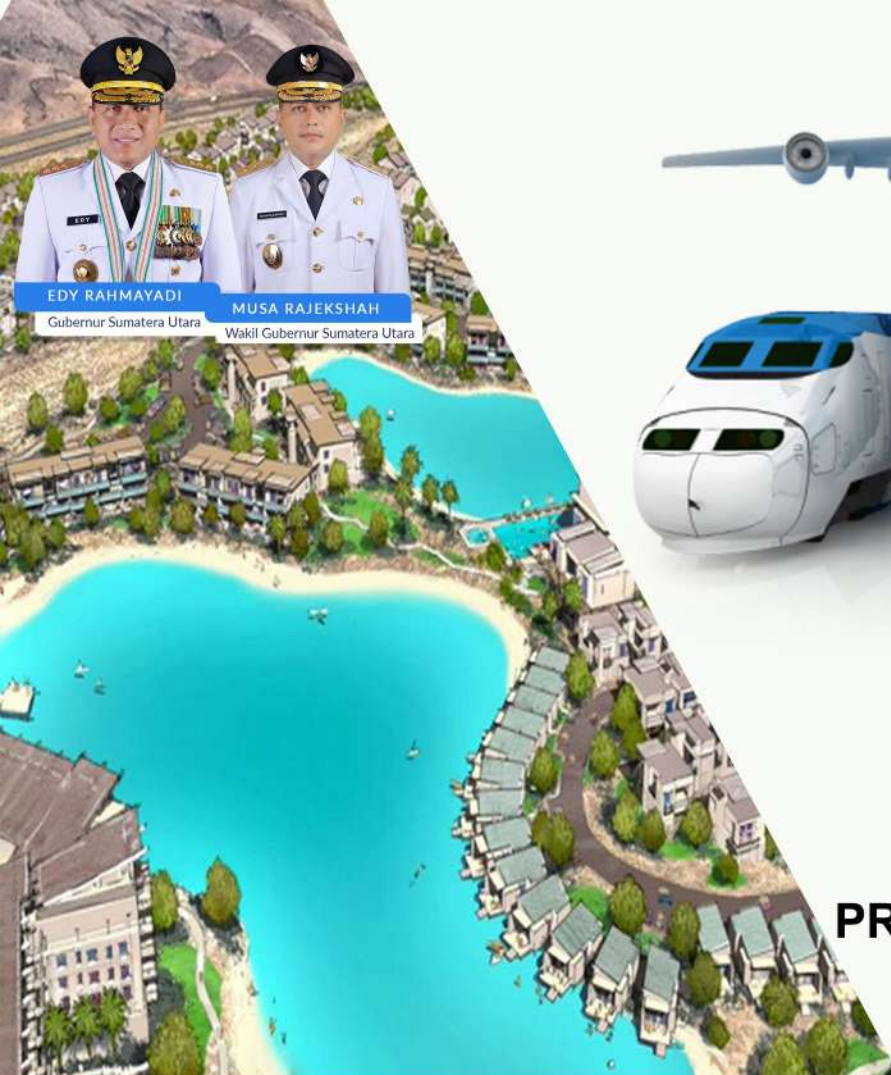




EDY RAHMAYADI
Gubernur Sumatera Utara

MUSA RAJEKSHAH
Wakil Gubernur Sumatera Utara



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Dinas ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Medan, Mei 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197610811 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....4

1.3. Maksud Dan Tujuan.....5

1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMUT TAHUN 2021 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Berdasarkan Capaian Program / Kegiatan.....8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.....11

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provisi Sumatera Utara.....12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH14

3.1. Telaahan Renja Dinas Perhubungan.....14

3.1.1. Telaahan Renja Terhadap Indakator Kinerja Utama (IKU)14

3.1.2. Telaahan Renja Terhadap Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN).....15

3.1.3. Telaahan Renja Terhadap Daerah Tertinggal.....15

3.1.4. Telaahan Renja Terhadap Inovasi.....15

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Prov. Sumut Tahun 2024.....16

3.3. Program dan Kegiatan17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN18

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan18

BAB V P E N U T U P.....24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan Rencana Tahun pertama Pelaksanaan Pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. Rencana Kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026.

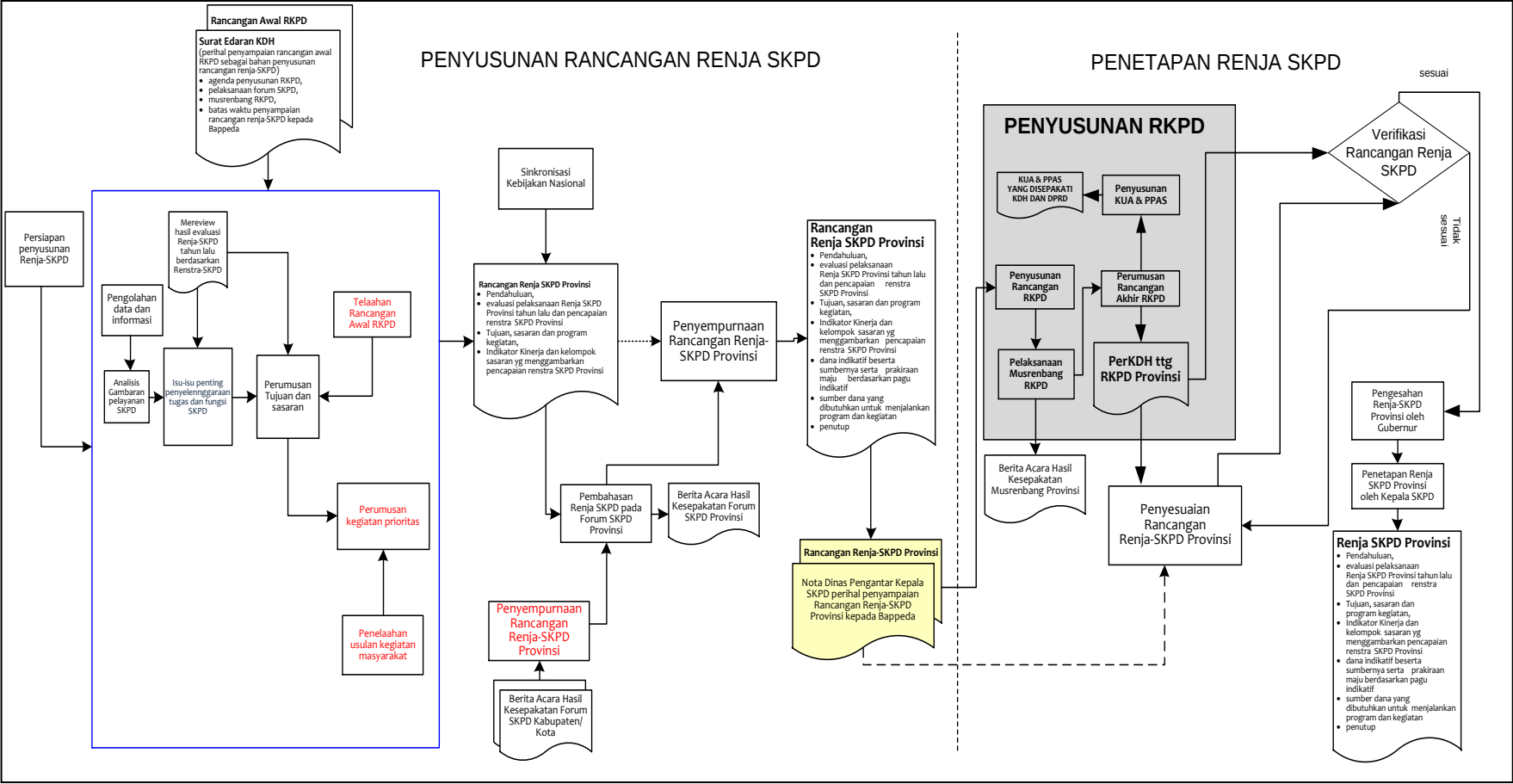
Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD (Pasal 129) terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan Pendahuluan Rencana Kerja (Renja) OPD;
2. Penyusunan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD tahun lalu;
3. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD; dan
4. Penetapan Rencana Kerja (Renja) OPD Sumatera Utara.



Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renja SKPD Provinsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Indikator dan capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan pada pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya (2022) dan tahun yang sedang berjalan (2023) maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada proses pembangunan tahunan tahap berikutnya (2024).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Prov. Sumut Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perekereetaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

- Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2020;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara tahun 2008 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
 21. Pergub Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023

1.3.2. Tujuan

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2024.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
3. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

4. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan Dokumen Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Berdasarkan Capaian Program / Kegiatan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Renja Dinas Perhubungan
- 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Prov. Sumut Tahun 2024
- 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMUT TAHUN 2021

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan Rencana Tahun ke-Empat Pelaksanaan Pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Berdasarkan Capaian Program / Kegiatan

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (Triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Triwulan IV Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

TABEL 1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Triwulan IV

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capain Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Anggaran DPA & DPPA	Capain Target		Realisasi	%	Sisa Anggaran
	2				3			4	5	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100	%	42,029,769,352.00	100	%	39,115,333,085.08	93.07	2,914,436,267
I	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Efektivitas Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Lintas OPD	12	Bulan	425,483,450.00	12	Bulan	411,868,790.00	96.80	13,614,660
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	12	Bulan	60,853,750.00	12	Bulan	58,778,670.00	96.59	2,075,080
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bulan	19,134,000.00	12	Bulan	10,849,900.00	56.70	8,284,100
					505,471,200.00			481,497,360.00	95.26	23,973,840
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN OPD serta Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN OPD	12	Bulan	27,567,127,529.00	12	Bulan	26,307,468,540.00	95.43	1,259,658,989
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	12	Bulan	708,000,000.00	12	Bulan	671,170,000.00	94.80	36,830,000
					28,275,127,529.00			26,978,638,540.00	95.41	1,296,488,989
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada OPD	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Bulan	273,900,900.00	12	Bulan	206,130,861.00	75.26	67,770,039
					273,900,900.00			206,130,861.00	75.26	67,770,039
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas ASN								
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	Bulan	200,064,000.00	12	Bulan	193,824,598.00	96.88	6,239,402
					200,064,000.00			193,824,598.00	96.88	6,239,402
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang baik	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	Bulan	84,925,720.00	12	Bulan	79,968,606.00	94.16	4,957,114
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12	Bulan	713,315,326.00	12	Bulan	603,727,747.00	84.64	109,587,579
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Makan, Logistik Kantor	12	Bulan	330,737,040.00	12	Bulan	264,570,220.00	79.99	66,166,820
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12	Bulan	166,538,192.00	12	Bulan	158,514,760.00	95.18	8,023,432
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	12	Bulan	41,300,000.00	12	Bulan	27,500,500.00	66.59	13,799,500
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	12	Bulan	3,026,461,000.00	12	Bulan	2,755,046,648.00	91.03	271,414,352
					4,363,277,278.00			3,889,328,481.00	89.14	473,948,797

VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	1,275,126,315.00	12	Bulan	1,023,147,996.00	80.24	251,978,319
2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	1,622,410,962.00	12	Bulan	1,599,679,899.08	98.60	22,731,063
3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	150,160,000.00	12	Bulan	149,093,069.00	99.29	1,066,931
					3,047,697,277.00			2,771,920,964.08	90.95	275,776,313
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan								
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat-Surat Dinas, Doku	12	Bulan	9,300,000.00	12	Bulan	7,093,350.00	76.27	2,206,650
2	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik, Air dan Telepon	12	Bulan	1,027,542,000.00	12	Bulan	776,125,913.00	75.53	251,416,087
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2,868,365,800.00	12	Bulan	2,661,215,014.00	92.78	207,150,786
					3,905,207,800.00			3,444,434,277.00	88.20	460,773,523
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	1,363,973,368.00	12	Bulan	1,080,870,754.00	79.24	283,102,614
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tepeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	95,050,000.00	12	Bulan	68,687,250.00	72.26	26,362,750
					1,459,023,368.00			1,149,558,004.00	78.79	309,465,364
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE KONEKTIVITAS SIMPUL ANGKUTAN JALAN			32,512,119,439.00			31,750,941,226.84	97.66	761,178,212
I	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN, JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBRANGAN dan KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN								
1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya kegiatan pemasangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan berupa Rambu,Guadarail,Delinotor, dan LPJU di Sumatera Utara	100	%	27,480,657,300.00	100	%	26,874,068,763.84	97.79	606,588,536
					27,480,657,300.00			26,874,068,763.84	97.79	606,588,536
II	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah KONEKTIVITAS SIMPUL ANGKUTAN JALAN								
1	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya Pembangunan Terminal Tipe B di Sumatera Utara	100	%	2,431,440,000.00	100	%	2,368,154,752.00	97.40	63,285,248
					2,431,440,000.00			2,368,154,752.00	97.40	63,285,248
III	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Monitoring Terhadap Angkutan AKDP, Pemadu Moda, Antar Jemput Penumpang (ANJAP)	100	%	829,240,125.00	100	%	794,286,752.00	95.78	34,953,373
2	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Kegiatan MULAKTAHUTA (mudik Gratis)	100	%	1,510,782,014.00	100	%	1,461,518,569.00	96.74	49,263,445
					2,340,022,139.00			2,255,805,321.00	96.40	84,216,818
IV	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Provinsi								
1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terlaksananya Dokumen Andalalin Sport Center	100	%	260,000,000.00	100	%	252,912,390.00	97.27	7,087,610
					260,000,000.00			252,912,390.00	97.27	7,087,610
					74,541,888,791.00			70,866,274,311.92	95.07	3,675,614,479

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Triwulan IV Tahun 2022. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 ini, dari 2 (dua) Program Dinas Perhubungan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebesar Rp 70.866.274.311,92,- Atau sebesar 95,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.541.888.791,- Sehingga sisa pagu anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 3.675.614.479,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang telah tertuang Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026.

TABEL 2
Tujuan, Sasaran Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target (%)					
						2024		2025		2026	
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,56	0,60		0,64		0,68	
			Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persentase	23,08 % (3 Terminal)	1 Terminal	38,46 %	1 Terminal	46,15 %	1 Terminal	53,85%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persentase	32,06 % (29.031 Unit)	10.817 Unit	53,65 %	12.338 Unit	67,14 %	10.030 Unit	78,12 %
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi	Persentase	83,33 %	83,52%		83,61 %		83,86 %	

Dinas Perhubungan Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Terwujudkan Konektivitas Nasional

Terwujudkan Konektivitas Nasional memiliki sasaran Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Rasio Konektivitas Provinsi

Terwujudnya Konektivitas Nasional dapat dihitung dengan Indikator Rasio Konektivitas Provinsi.

Formulasi :

$$K_{Tprov} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL}) + (K_{TP} \times W_{TP})$$

Keterangan Rumus

No	Variabel Konektivitas	Faktor Pengali
A	KTD = Rasio Konektivitas Transportasi Darat	WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat
B	CTL = Rasio Konektivitas Transportasi Laut	WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut
C	KTP = Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	WTP = Bobot Konektivitas Transportasi Perkotaan

Variabel Konektivitas Transportasi Provinsi:

- a. **Rasio Konektivitas Transportasi Darat (K_{TD})** = Jumlah KSPN, DTPK, dan Pusat Kegiatan Ekonomi yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan

DIBANDINGKAN Jumlah KSPN, DTPK, Kawasan Industri dan Pusat Kegiatan Ekonomi yang ditetapkan.

- b. **Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (K_{TL})** = Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut **DIBANDINGKAN** dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut.

**) sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 636 pelabuhan*

- c. **Rasio Konektivitas Perkotaan (K_{TP})** = Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan

DIBANDINGKAN Jumlah kawasan perkotaan prioritas

2. Persentase Konektivitas Simpul Transportasi Jalan

Indikator ini dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : (Jumlah Terminal Tipe B Dibangun / Total Terminal Tipe B di Sumatera Utara) x 100%

2. Meningkatnya Keselamatan Jalan

Meningkatnya Keselamatan Transportasi memiliki sasaran Meningkatnya Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas dan memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

- 1. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Indikator ini dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : (Jumlah Faskes yang terpasang/Total Kebutuhan Faskes)x100%.

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan memiliki sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan memiliki 1 indikator yaitu:

1. On Time Performance Layanan Transportasi

Formulasi :

Persentase capaian rata-rata nilai on Time Performance (OTP) Angkutan SDP, Laut, dan Perkotaan berbasis jalan

- a. Nilai OTP Angkutan Jalan (Perkotaan) = **Layanan BRT** di wilayah Metropolitan / Perkotaan yang tepat waktu DIBAGI jumlah layanan BRT dalam 1 tahun.
- b. Nilai OTP Angkutan Penyeberangan = Jumlah pelayaran pada pelabuhan penyeberangan tepat waktu DIBAGI Jumlah pelayaran dalam 1 tahun
- c. Nilai OTP Angkutan Laut = Jumlah pelayaran pada pelabuhan pengumpan regional tepat waktu DIBAGI Jumlah pelayaran dalam 1 tahun

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Sesuai Pergubsu Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bahwa tugas posko dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah :

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan Yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian, serta pengembangan lingkungan Perhubungan dan tugas pembantuan.

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalulintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Melaksanakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang angkutan jalan meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan terminal.
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan, pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat, sungai, danau dan penyeberangan.
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian dan pengembangan meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
 - e. Penyelenggaran administrasi internal dan eksternal.
 - f. Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan

Pembangunan perhubungan merupakan sektor yang mempunyai peran penting dan strategis dalam kegiatan distribusi barang, penumpang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dalam kerangka sistem logistic nasional serta sebagai wahana pemersatu Wawasan Nusantara guna mewujudkan Visi Misi Gubernur dan cita-cita pembangunan nasional.

Tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya salah satu disebabkan masih kurang memadainya fasilitas keselamatan jalan. Seperti rambu lalu lintas, LPJU, Guadrail, Delineator, Marka Jalan dan Paku Jalan. Untuk menekan jumlah kecelakaan tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya menganggarkan pengadaan fasilitas keselamatan jalan.

Buruknya kesan masyarakat terhadap keadaan terminal, oleh karena itu perlunya pembangunan terminal yang modern. Dinas Perhubungan Pemprov Sumatera Utara selaku dinas yang menaungi terminal Tipe B merencanakan pembangunan terminal yang modern. Dari 13 terminal Tipe B, 5 yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumatera Utara, satu terminal yang sudah dibangun dan 8 terminal yang belum diserahkan pemerintah Kota/Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Renja Dinas Perhubungan

3.1.1. Telaahan Renja Dinas Perhubungan Kebijakan Nasional

Dukungan Rencana Kerja Dinas Perhubungan terhadap Proyek Prioritas Strategis 10 Destinasi Pariwisata Prioritas salah satunya Danau Toba dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukit Lawang dan Tangkahan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan merencanakan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Semangkei juga merupakan Program Prioritas Nasional yang memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik. KEK Sei Mangkei difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional. Dukungan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terhadap KEK Sei Semangkei melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan merencanakan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Ruas jalan Pematang Siantar – Perdangangan Jalan Akses menuju KEK Semangkei
2. Pengadaaan dan pemasangan Deliniator di Ruas jalan Pematang Sinter – Perdangangan Jalan Akses menuju KEK Semangkei.
3. Pengadaaan dan pemasangan Paku Jalan di Ruas jalan Pematang Sinter – Perdangangan Jalan Akses menuju KEK Semangkei.
4. Pengadaaan dan pemasangan Marka di Ruas jalan Pematang Sinter – Perdangangan Jalan Akses menuju KEK Semangkei.

3.1.2. Telaahan Renja Terhadap Indakator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perhubungan Sumatera Utara selaku dinas yang menangani sarana dan prasarana perhubungan mempunyai 4 IKU yaitu:

1. Rasio Konektivitas Provinsi
Rasio Konektivitas Transportasi Darat (K_{TD}), Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (K_{TL}) dan Rasio Konektivitas Perkotaan (K_{TP})
2. Persentase Konektivitas Simpul Transportasi Jalan
Sumatera Utara memiliki 13 terminal Tipe B yang sudah diserahkan 5 unit yaitu Terminal Kabanjahe (Kab. Karo), Terminal Sijambi (Kota Tanjung Balai), Terminal Tanjung Beringin (Kab. Langkat) Terminal Bahorok (Kab. Langkat) dan Terminal Lubuk Pakam (Kab. Deli Serdang). Ada 8 terminal yang belum diserahkan oleh Kabupaten/ Kota. Dinas Perhubungan Sumatera Utara sudah membangun 3 terminal. Target Dinas Perhubungan di Renstra 2023-2026 sebanyak 3 terminal yang akan diserahkan ke Provinsi, dibangun dan beroperasi .

TABEL 4
Status Terminal Tipe B Di Provinsi Sumatera Utara

No.	Terminal Tipe B	Kab. /Kota	Keterangan
1	Kabanjahe	Karo	Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut
2	Sijambi	Tanjung Balai	Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut
3	Tanjung Beringin	Langkat	Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut
4	Bahorok	Langkat	Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut
5	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Sudah diserahkan ke Pemprov. Sumut
6	Gunung Tua	Paluta	Belum diserahkan
7	Sosorsaba Parapat	Simalungun	Belum diserahkan
8	Perdagangan	Simalungun	Belum diserahkan
9	Ikan Paus Binjai	Binjai	Belum diserahkan
10	Tanjung Pura	Langkat	Belum diserahkan
11	Aek Kanopan	Labura	Belum diserahkan
12	Faekhu	Gunung Sitoli	Belum diserahkan
13	Perdagangan	Simalungun	Belum diserahkan

3. Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan.

Indikator ini dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : (Jumlah Faskes yang terpasang/Total Kebutuhan Faskes)x100%.

Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Utara untuk Rambu Lalu Lintas, Guardrail, Delineator, Paku Jalan, Marka Jalan dan LPJU sebanyak 10.030 unit fasilitas keselamatan jalan.

4. On Time Performance Layanan Transportasi

Persentase capaian rata-rata nilai on Time Performance (OTP) Angkutan SDP, Laut, dan Perkotaan berbasis jalan.

3.1.3. Telaahan Renja Terhadap Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN)

Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung pembangunan nasional yang ada di kawasan Sumatera Utara, dalam Renja 2024 kegiatan yang mendukung KSPN yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan.

3.1.4 Telaahan Renja Terhadap Daerah Tertinggal

Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung pembangunan daerah tertinggal yang ada kawasan Sumatera Utara yaitu di Kab. Nias Selatan , Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias.

3.1.5. Telaahan Renja Terhadap Inovasi

Kegiatan inovatif yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan tahun 2024 dilakukan adalah pembuatan aplikasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Prov. Sumut Tahun 2024

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Yang menjadi tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya jalan yang berkeselamatan (*safer road*) berupa pembangunan faskes di jalan-jalan provinsi, meningkatnya konektivitas antara kabupaten/kota di Sumatera Utara (*connectivity*) berupa pembangunan terminal Tipe B.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam Renja Tahun 2024 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provsu sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ada 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Rencana program, dapat dilihat pada table 7 dibawah ini:

TABEL 7
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Pelartan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan untuk Keperluan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa dan Perlengkapan Surat menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksannya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B
	Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	Terlaksannya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Pesyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Pemprov Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Perkiraan Maju Tahun 2024 yang telah Disusun Berdasarkan RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kawasan Strategis Pembangunan Nasional atas usulan masyarakat dan Hasil Musrembang Provinsi Sumatera Utara dengan ini Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Pemprov Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 8
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	88.683.594.872
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	45.857.528.635
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.826.066.237
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	404.703.577
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	331.618.000
	#FORUM OPD TA 2025 DISHUBSU	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.410.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.508.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.150.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	156.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	73.085.577
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.821.466
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.264.111
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.789.712.413
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.744.559.913
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.054.530.340
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	889.724.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	545.353.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.240.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	267.822.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	476.747.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.298.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	904.137.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.515.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	55.545.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.965.458.573
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.559.670.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.950.320.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)- (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	284.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	242.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	41.520.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH I BINJAI)	90.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.480.000

2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE)	78.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.600.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH III KISARAN)	70.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	70.320.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG)	70.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	70.320.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN)	62.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.160.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI)	62.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.160.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD ADP PARAPAT)	62.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.160.000
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perhubungan)	264.912.500
	#SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.402.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.510.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	85.600.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	827.100.000
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	427.100.000
	#FAMILY GATHERING 2024	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	72.100.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	75.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	250.000.000
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	150.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.654.704.147
Dinas Perhubungan		4.070.134.726
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.067.240
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.067.240
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.385.236.486
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.634.835
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	72.200.110
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.989.590
	Pengadaan Videotron	2.000.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.400.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.099.750

5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	140.494.517
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.186.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.771.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.665.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Pelayanan Umum kantor	45.000.000
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.045.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.165.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	39.880.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.600.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.210.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	250.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÅiLuar Negeri	210.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		274.009.308
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.396.386
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.396.386
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.852.822
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.070.078
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.782.744
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.961.100
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.934.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.026.900
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		253.552.359
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.751.353
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.751.353
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.585.736
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.551.666
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.034.070
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.516.270
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.660.520
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.855.750
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		246.180.509
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.486.420

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.486.420
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.700.819
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.359.842
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.340.977
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.338.520
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.855.750
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		246.757.445
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.842.532
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.842.532
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.921.643
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.761.666
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.159.977
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.338.520
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.855.750
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		221.341.018
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.516.105
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.516.105
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.831.643
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.761.666
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.069.977
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.338.520
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.855.750
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.000.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		196.839.280
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.947.312
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.947.312
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.921.643
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.761.666

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.159.977
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.171.325
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.315.575
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.855.750
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000.000
UPTD ADP PARAPAT		145.889.502
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.557
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.489.557
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.406.675
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.402.698
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.003.977
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.315.575
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.878.695
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		300.000.000
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		300.000.000
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		300.000.000
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	50.000.000

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.381.906.100
Dinas Perhubungan		2.721.307.100
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.370.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.595.600
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.775.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	835.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	75.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	500.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	260.400.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.881.536.500
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	44.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	287.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	616.687.500
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	411.125.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	138.586.500
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	123.337.500
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PISU, KRIYA FEST, DEKRANAS, PRSU dll)	260.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		977.006.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	355.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.036.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	170.000.000
	Terminal Ikan Paus	45.000.000
	Terminal Lubuk Pakam	45.000.000
	Terminal Pasar X	50.000.000
	UPTD KANTOR BINJAI	30.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	52.536.000
	Kantor UPTD Wilayah Binjai	13.134.000
	Terminal Ikan Paus	13.134.000
	Terminal Lubuk Pakam	13.134.000
	Terminal Pasar X	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	731.115.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	45.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	287.787.500
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	397.827.500
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		954.068.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.268.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	150.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.268.000
	#Kantor UPTD Kabanjahe	13.134.000
	#Terminal Kabanjahe	13.134.000

2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	319.412.500
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	447.887.500
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		175.134.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	91.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		129.634.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	45.500.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		119.634.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.134.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	91.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	45.500.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		129.634.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	91.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	45.500.000
UPTD ADP PARAPAT		175.489.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	355.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	45.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	45.500.000
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.867.940.000
Perhubungan		949.000.000
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	809.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	150.000.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	75.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	384.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	50.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	90.000.000
	Service Komputer	30.000.000
	Service Laptop	30.000.000
	Service Printer	30.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		92.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		97.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	

	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		97.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		97.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		97.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000

UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		97.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
UPTD ADP PARAPAT		432.990.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.990.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.990.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
	#Ganti Mesin Kapal Patroli	350.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	
	#service AC berkala	2.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.000.000
	Service Komputer	1.000.000
	Service Laptop	1.000.000
	Service Printer	1.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	40.757.528.635
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	26.957.528.635
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		5.061.666.115
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.561.666.115
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	217.222.196
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD Wilayah I Binjai	217.222.196
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.344.443.919
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		6.364.060.423
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.864.060.423
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	279.240.973
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD PSP Wilayah II KABANJAHE	279.240.973

5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.584.819.450
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		4.432.603.018
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.932.603.018
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	187.266.810
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD PSP Wilayah III KISARAN	187.266.810
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.745.336.208
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		4.687.492.239
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.187.492.239
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	199.404.392
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD PSP Wilayah IV TARUTUNG	199.404.392
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.988.087.847
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		3.297.316.775
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.097.316.775
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	147.491.275
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD PSP Wilayah V PADANG SIDEMPUAN	147.491.275
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.949.825.500
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		3.114.390.065
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.614.390.065
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	124.494.765
	[#] Konsultan Pengawasan pada UPTD PSP Wilayah VI GUNUNG SITOLI	124.494.765
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.489.895.300
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	9.000.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		9.000.000.000
2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	9.000.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
	[#] REHABILITASI GEDUNG TERMINAL SIJAMBI KOTA TANJUNG BALAI	9.000.000.000

BIDANG LALU LINTAS JALAN		1.500.000.000
2.15.02.1.05	Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.500.000.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	1.500.000.000
	[-] SOSIALISASI KESELAMATAN LLAJ	500.000.000
	[-] PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE	1.000.000.000
BIDANG ANGKUTAN JALAN		2.000.000.000
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000
	[-] MUDIK GRATIS BERMARTABAT LEBARAN DAN NATARU	2.000.000.000
BIDANG ANGKUTAN JALAN		1.300.000.000
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1.300.000.000
	[-] SOSIALISASI ANGKUTAN	500.000.000
	[-] KEGIATAN ODOL	800.000.000
BIDANG PELAYARAN		600.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	600.000.000
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	600.000.000
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	600.000.000
	[-] SOSIALISASI KESELAMATAN PELAYARAN	500.000.000
	[-] KONSULTAN UNTUK DANA DAK 2025	100.000.000
BIDANG PERKABANG		4.500.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.500.000.000
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	4.500.000.000
2.15.05.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	4.500.000.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI PERLINTASAN SEBIDANG DI RUAS JALAN PROVINSI	500.000.000
	[-] Pembangunan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi 1. Air Joman I 2. Air Joman II	4.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini disusun, mengacu pada tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA.2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja TA.2024 ini juga sudah mengakomodir kegiatan yang bersifat *top down* dan *bottom up*, sehingga diharapkan sudah merepresentasikan kebutuhan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Sumatera Utara, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Medan, Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197610811 199903 1 003

